

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH

(Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022)



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan program S-1 Akuntansi
Dengan Konsentrasi:
Akuntansi Sektor Publik**

Oleh :

**Jati Rahmawati
NIM 23210011**

WIDYA MANGGALA SCHOOL OF ECONOMICS

STIE WIDYA MANGGALA

SEMARANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
ALOKASI BELANJA DAERAH**

(Kabupaten / Kota Se- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022)

SKRIPSI

Disusun oleh :
Jati Rahmawati
NIM 23210011

Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing I dan II pada
hari Kamis, 19 September 2024

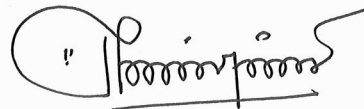
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si., Ak., CA., CGAA
NIDN. 0615127102

Pembimbing II



Iin Indarti, S.E., M.Si
NIDN. 0613077101

Pembantu Ketua I
STIE Widya Manggala



Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si., Ak., CA., CGAA
NIDN. 0615127102

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI



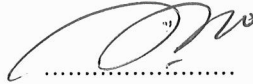
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
ALOKASI BELANJA DAERAH**

(Kabupaten / Kota Se- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022)

SKRIPSI

Disusun oleh :
Jati Rahmawati
NIM 23210011


Telah Dipertahankan dan Disahkan
oleh Panitia Penguji Skripsi
pada hari Kamis, 12 September 2024

<u>Nama Lengkap</u>	<u>Tanda Tangan</u>
Ketua Penguji : Nurdhiana, S.E, M.si, Ak, CA	
Anggota 1 : Dr. Elma Muncar Aditya, S.E, MSi, Akt	
Anggota 2 : Triani, S.E., M.Ak	

Disahkan oleh :

Ketua STIE Widya Manggala




Freddy Aldo Setiawan, S.Kom, SM, MM
NIDN. 0601128901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan saya ini tidak benar serta ada tuntutan dari pihak lain, saya siap menerima segala konsekuensi dalam bentuk apapun, termasuk pencabutan gelar yang diperoleh.

Semarang, 26 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Jati Rahmawati
NIM 23210011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022)"** ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Freddy Aldo Setiawan, S.Kom.,S.M.,M.M. selaku Ketua STIE Widya Manggala Semarang.
2. Ibu Dr. Yeni Kuntari, SE.,MSi.,Ak.,CA.,CGAA selaku Dosen Pembimbing I, selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan saran, arahan, motivasi dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Iin Indarti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, arahan, motivasi, dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Dosen dan staff karyawan STIE Widya Manggala Semarang yang memberikan petunjuk serta motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Semua Pihak yang selalu mendoakan dan mendukung hingga Skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati ini, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan sehingga Skripsi ini dapat selesai dengan maksimal.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca.

Semarang, 26 Agustus 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jati Rahmawati', enclosed within a hand-drawn diamond-shaped border.

Jati Rahmawati
NIM 23210011

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of factors such as local government revenue, funding balance and other revenue on regional expenditure allocations in regency/city governments in Central Java Province. Regional expenditure plays an important role in the operation of the government system, namely to improve the welfare of the community as a form of good governance. The population in this study were regency/city governments in Central Java Province. This research uses descriptive analysis, classical assumption tests and multiple linear regression analysis using data obtained from the Central Statistics Agency in the form of Regional Revenue and Expenditure Budget Realisation Reports (LRA APBD) which were audited in Regencies and Cities in Central Java Province in 2020 - 2022.

Keywords: local government revenue, transfer revenue, other revenue, expenditure allocation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoretis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	8
2.1.2 Belanja daerah (Y)	9
2.1.2.1 Klasifikasi Belanja Daerah	9
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X ₁)	10
2.1.4 Dana Perimbangan(X ₂)	11
2.1.5 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (X ₃)	12
2.2 Penelitian Terdahulu	13
2.3 Kerangka Teoretis	14
2.4 Pengembangan Hipotesis	17

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap belanja daerah (Y)....	17
2.4.2 Dana Perimbangan(X_2) terhadap Belanja daerah (Y).	18
2.4.3 Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X_3) terhadap Belanja daerah (Y).....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Variabel Penelitian	21
3.2.1 Variabel Independen.....	21
3.2.2 Variabel Dependen	22
3.3 Definisi Operasional.....	22
3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (X_1).....	22
3.3.2 Dana Perimbangan (X_2).....	23
3.3.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X_3).....	24
3.4 Populasi dan Sampel	24
3.4.1 Populasi	24
3.4.2 Sampel	24
3.5 Teknik pengambilan sampel	24
3.6 Jenis Data	25
3.7 Sumber Data.....	26
3.8 Teknik pengumpulan data.....	27
3.8.1 Studi Pustaka	27
3.8.2 Dokumentasi.....	27
3.9 Teknik Analisis Data.....	27
3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif	28
3.9.2 Uji Asumsi Klasik.....	28
3.9.3 Uji Kekuatan Model	29
3.9.3.1 Analisis Koefisien Determinasi	29
3.9.3.2 Analisis Hipotesis Uji F	29
3.9.4 Regresi berganda Berganda	30
3.9.5 Pengujian Hipotesis	32

BAB IV GAMBARAN UMUM.....	37
4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah.....	37
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
5.1 Analisis Deskriptif	43
5.2 Uji Asumsi Klasik	45
5.2.1 Uji Normalitas.....	45
5.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	48
5.2.3 Uji Multikolinearitas.....	49
5.3 Uji Kekuatan Model	50
5.3.1 Analisis Koefisien Determinasi	50
5.3.2 Analisis Hipotesis Uji F (Simultan).....	51
5.4 Analisis Hasil Regresi Linier Berganda	52
5.5 Hasil Uji T (Parsial).....	52
5.6 Pembahasan	59
5.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Y)	59
5.6.2 Pengaruh Dana Perimbangan (X_2) Terhadap Belanja daerah (Y).....	61
5.6.3 Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (X_3) Terhadap Belanja daerah (Y)	62
BAB VI PENUTUP	64
6.1 Simpulan	64
6.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja	3
Tabel 1.2	Tabel Belanja Daerah Tahun 2020-2022	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1	Pendapatan Asli Daerah	23
Tabel 4.1	Tabel Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Provinsi Jawa Tengah.....	38
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Bekerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022	40
Tabel 5.1	Tabel Analisis Deskriptif (Dalam Milyar Rupiah).....	43
Tabel 5.2	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Ke-1.....	45
Tabel 5.3	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Ke-2.....	47
Tabel 5.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas	48
Tabel 5.5	Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 5.6	Hasil Analisis Koefisien Determinasi	50
Tabel 5.7	Uji Simultan	51
Tabel 5.8	Hasil Regresi Linier Berganda.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teoretis Panjaitan	15
Gambar 2.2	Kerangka Teoretis Ferdiasyah, dkk.....	16
Gambar 2.3	Kerangka teoritis Simanjuntak dan Ginting.....	16
Gambar 2.4	Kerangka Teoritis Panjaitan.....	17
Gambar 3.1	Pendapatan Asli Daerah	23
Gambar 3.2	Kurva Menarik Kesimpulan.....	26
Gambar 3.3	Kurva distribusi F.....	33
Gambar 3.4	Kurva distribusi.....	35
Gambar 4.1	Gambar Peta Provinsi Jawa Tengah.....	37
Gambar 5.1	Histogram Uji Normalitas	46
Gambar 5.2	Histogram Uji kolmogorov-smirnov.....	47
Gambar 5.2	Histogram Uji scatterplot.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran	69
Lampiran 2	Input SPSS.....	70
Lampiran 3	Output SPSS	75
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup	80
Lampiran 5	Kartu Bimbingan Skripsi	81
Lampiran 6	Lembar Perbaikan Skripsi.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang telah berjalan selama 28 tahun membawa dampak yang baik bagi pemerintah daerah di Indonesia. Otonomi daerah membawa konsep yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan masing-masing wilayahnya. Termasuk pengelolaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pemerintah daerah juga dapat menentukan kebijakan serta program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah maupun masyarakatnya sendiri. Hal ini memungkinkan adanya pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan wilayah dan meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah tersebut dalam pengambilan keputusan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi keuangan terjadi ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola keuangannya sendiri.

Pengelolaan keuangan daerah menuntut akuntabilitas dan transparansi yang semakin besar dengan tetap memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan (Halim,2019). Alat pengelolaan keuangan daerah ini berupa Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun sebagai proyeksi pendapatan dan belanja daerah untuk satu periode anggaran. Menurut Simanjuntak dan Ginting (2018) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD). Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program.

Dalam pengalokasian belanja daerah ini, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Andrasari,dkk (2018) pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda, daerah yang maju dalam industri dan memiliki sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar daripada daerah lainnya, sementara daerah dengan kondisi sebaliknya mengalami ketimpangan dalam PAD. Ketidakmampuan dalam merencanakan dan mengawasi keuangan dapat menyebabkan kebocoran yang signifikan di tingkat daerah. Peran pendapatan asli daerah dalam mendukung pengeluaran daerah bervariasi, berkisar antara kurang dari 10% hingga 50%.

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang meliputi transfer dari pemerintah pusat serta transfer antar daerah. Transfer dari pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana

desa. Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan ini salah satunya digunakan pada saat terjadi bencana.

Faktor-faktor tersebut yang meliputi PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dipergunakan dalam rangka untuk mendanai kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib, pemerintahan pilihan, dan pelayanan dasar. Pengeluaran untuk urusan pemerintahan harus didahulukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus pada pemenuhan kewajiban dalam bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang memadai, serta pengembangan sistem jaminan sosial.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat

Kabupaten/ Kota	Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja daerah (dalam milyar rupiah)					
	Pendapatan Daerah			Belanja Daerah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Jawa Timur	1.115.4 90,41	131.0 84,62	1.190.9 43,23	1.121.9 57,88	126.9 62,87	1.187.9 37,74
Jawa Tengah	102.6 01,75	107.4 80,98	103.7 38,74	101.4 30,17	103.8 14,45	105.9 31,69
Jawa Barat	124.2 69,09	131.9 08.,84	128.3 15,63	128.0 48,15	139.6 37,22	128.8 60,25

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2024.

Berdasarkan data diatas bahwa kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki tingkat pendapatan dan belanja daerah yang rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal ini menjadi perhatian peneliti bahwa Provinsi Jawa Tengah kurang optimal dalam hal menggali pendapatan daerah dan pengalokasian belanja daerah.

Menurut penelitian Rohmah dan Raharjo (2023) pengalokasian anggaran belanja daerah (APBD) di setiap daerah merupakan hal yang penting. Menurutnya masalah-masalah pengalokasian pendapatan daerah terhadap dana belanja ini, diakibatkan karena adanya perbedaan pendapatan tiap daerah, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak daerah maupun retribusi, serta kurangnya pengoptimalan belanja daerah untuk pelayanan publik, maupun infrastruktur.

Sumber pendapatan daerah yang diperoleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Berikut tabel realisasi belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022:

Tabel 1.2 Tabel Belanja Daerah Tahun 2020-2022

Jenis Belanja	Realisasi Belanja Dalam (Miliar Rupiah)		
	2020	2021	2022
Belanja Pegawai	42.664,20	37.095,76	37.260,75
Belanja Barang Jasa	25.780,45	26.242,22	27.736,24
Belanja Modal	15.624,36	11,376,72	13.215,82
Belanja Lainnya	30.712,45	29.199,72	27.978,74

Sumber : Data DJPK, 2024.

Dilihat dari tabel tersebut belanja pegawai masih menunjukkan angka tertinggi dari tahun ke tahun dibandingkan belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Realisasi belanja pegawai tahun 2021 turun sebesar 5.568,44 milyar atau 1,14% dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 164,99 milyar rupiah atau 0,99%. Belanja barang jasa naik sebesar 461,77 milyar rupiah atau sebesar 0,98% dan naik pada tahun 2022 sebesar 1.494,02 milyar rupiah atau 0,94%. Belanja modal pada tahun 2021 turun sebesar 42.247,64 milyar rupiah atau 1,37% dan pada tahun 2022 naik sebesar 1.839,1 milyar rupiah atau 0,86%, sedangkan belanja lainya turun sebesar 1.512,73 milyar rupiah atau 1,05% dan pada tahun 2022 turun sebesar 1.220,98 milyar rupiah atau 1,04%.

Dari tabel pendapatan dan belanja daerah tahun 2020-2022, pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai alokasi belanjanya. Hal ini berarti belanja daerah belum dimaksimalkan untuk kepentingan publik dan program belanja daerah belum memberikan dorongan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih luas.

Penelitian ini menjadi penting dalam konteks alokasi anggaran belanja daerah (APBD) di setiap wilayah karena masalah-masalah seperti disparitas pendapatan daerah, rendahnya kesadaran dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, kurang efisien proses pemungutan pajak, serta kurangnya optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur masih menjadi perhatian. Lebih lanjut, hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti

penelitian oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019) yang membuktikan pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah, dan penelitian oleh Susilowati (2020) menyoroti pengaruh lain-lain terhadap belanja daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak sumber-sumber pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah setempat terhadap belanja daerah dalam rentang tahun 2020-2022. Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti mengambil judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan masalah di atas, maka dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh terhadap belanja daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022?
2. Bagaimana dana perimbangan (X_2) berpengaruh terhadap belanja daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022?
3. Bagaimana lain-lain pendapatan daerah yang sah (X_3) berpengaruh terhadap belanja daerah (Y) pada Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memberikan bukti bahwa faktor-faktor seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pemerintahan yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh penulis selama masa studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir melalui penulisan karya ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Scott (2011) menegaskan bahwa asimetri informasi dibedakan menjadi dua, yakni *adverse selection* dan *modal hazard*. *Adverse selection* yaitu jenis asimetri informasi dimana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang memiliki manfaat informasi yang sama (Febriyanti:2022).

Teori keagenan berfokus pada hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang mendelegasikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama mereka sendiri, sementara agen adalah pihak yang menerima delegasi tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan principal. Dalam konteks pemerintah daerah, principal adalah masyarakat atau pemerintah pusat, sedangkan agen adalah pemerintah daerah.

Keterkaitan teori agensi dengan penelitian ini yaitu masyarakat sebagai *principal* membayar pajak daerah, retribusi daerah, dan kontribusi lainnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya memberikan dana transfer maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah (bantuan hibah maupun bantuan sosial) kepada pemerintah daerah. Sebagai agen, pemerintah daerah memberikan timbal balik pendapatan daerah yang didapat digunakan untuk belanja daerah yang tujuannya memberikan fasilitas umum yang baik dan memadai serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

2.1.2 Belanja daerah (Y)

Belanja daerah merupakan distribusi anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam berbagai program dan kegiatan yang direncanakan. Alokasi belanja ini merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan instrument kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran daerah. Menurut Siregar (2017:203) belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2.1.2.1 Klasifikasi Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada beberapa klasifikasi belanja yang dituangkan dalam anggaran belanja daerah, belanja ini meliputi :

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang jasa.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang meberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X₁)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang ada di wilayah sendiri, yang dikelola dan diatur oleh pemerintah daerah setempat (Elsye, 2020). PAD merupakan suatu komponen penting karena pendapatan ini menunjukkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai kebutuhan dan pembangunan daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak air tanah, dan pajak penerangan jalan.
2. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah seperti, retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi mendirikan bangunan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti laba dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber pendapatan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori diatas tetapi sah menurut peraturan

perundang-undangan, seperti pendapatan bunga, pendapatan dari penjualan asset, dan lain sebagainya.

2.1.4 Dana Perimbangan(X₂)

Dana perimbangan adalah dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah lainnya (Sarsiti, 2020). Pendapatan ini bertujuan untuk membantu daerah dalam menjalankan fungsinya dalam pemerintahan dan pembangunan yang sepenuhnya tidak dapat dibiayai oleh pendapatan asli daerah (Susilowati,dkk, 2021). Dana perimbangan merupakan komponen utama dalam struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Indonesia. Dana perimbangan sangat penting bagi daerah, terutama daerah yang memiliki kemampuan PAD yang rendah. Dengan adanya dana perimbangan, diharapkan daerah dapat lebih optimal dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 komponen Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dari APBN ke setiap daerah untuk mendanai kebutuhan umum pemerintahan daerah. DAU bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan memastikan standar pelayanan minimum dapat dicapai di seluruh daerah.
2. Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang diberikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas nasional, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. DAK dibagi menjadi beberapa jenis seperti DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

3. Dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
4. Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan bagian daerah atas pendapatan negara yang diperoleh dari sumber daya alam (seperti minyak, gas, mineral, kehutanan) dan pajak tertentu. DBH bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada daerah penghasil atas eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya.
5. Dana insentif daerah (DID) adalah dana yang diberikan sebagai insentif kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan pemerintah, dan indikator lainnya yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

2.1.5 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (X₃)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah pemerintah daerah lainnya, dari pemerintah pusat, maupun dari pihak swasta atau masyarakat. Menurut Andrasari,dkk (2018) lain-lain pendapatan daerah yang sah ini meliputi:

1. Dana hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang barang/jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
2. Dana darurat adalah dana yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat akibat bencana alam yang tidak dapat diperkirakan.

3. Pendapatan lainnya adalah berupa dana bagi hasil dari provinsi kepada kabupaten/kota maupun dana dari BUMD.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan ataupun referensi peneliti dalam menyusun karya ilmiah. Selain itu, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya dilakukan untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	VARIABEL	ALAT ANALISIS	HASIL
1	Andrasari,dkk (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah variabel independen, Belanja Daerah variabel dependen	Kuantitatif, Uji asumsi klasik, Uji regresi linier Berganda, Uji koefisien determinasi	Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah
2	Aminus (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir	Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan variabel independen, Belanja Daerah variabel dependen	uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji regresi linier berganda	adanya hubungan simultan antara Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir

3	Asari dan Suardana (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah variabel independen, belanja daerah variabel dependen	analisis regresi linier berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif pada Belanja Daerah
4	Kristiyanti,dkk (2022) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah variabel independen, belanja daerah variabel dependen	uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda	pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah
5	Rohmah dan Rahardjo (2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah variabel independen, Belanja Daerah variabel dependen	Regresi linier berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer berpengaruh positif dan signifikan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Daerah

Sumber : Reviuw Jurnal, 2024

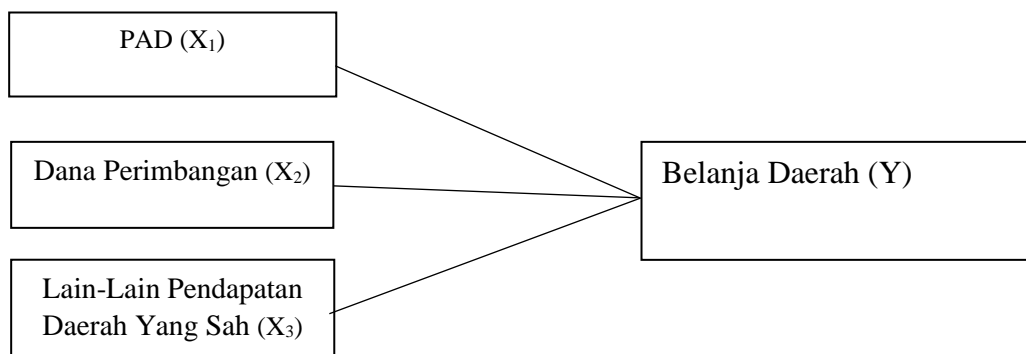
2.3 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis atau paradigma adalah uraian yang menegaskan tentang teori apa yang digunakan sebagai dasar (teori utama = *grand theory*) untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan (mengistilahkan) unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti serta hubungannya dengan

variabel. Sedangkan kerangka operasional adalah uraian variabel-variabel dan indikator-indikatornya yang hendak diukur dalam penelitian. Raihan (2017: 72).

Pendapatan daerah merupakan komponen yang penting dalam pengalokasian belanja dalam organisasi pemerintahan daerah. Pendapatan daerah yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian dan kemakmuran masyarakat di daerahnya.

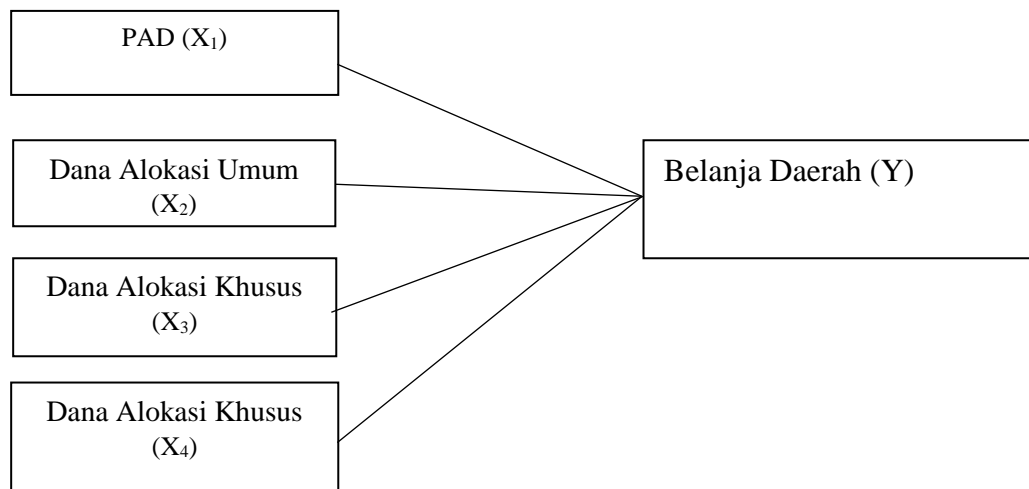
Pada penelitian Panjaitan (2021) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun gambar kerangka teoritis ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Teoretis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah

Sumber : Panjaitan (2021)

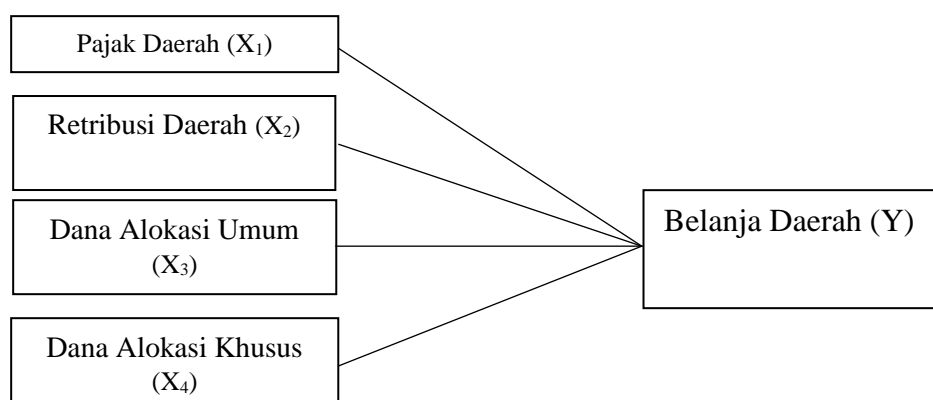
Pada penelitian Ferdiasyah, dkk (2018) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. Adapun gambar kerangka teoritis ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 : Kerangka Teoretis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah.

Sumber : Ferdiasyah, dkk (2018)

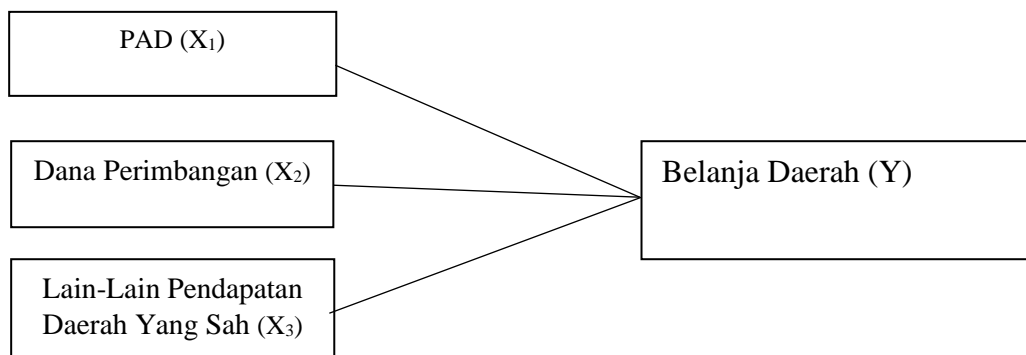
Penelitian lain yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Ginting (2019) yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. Adapun gambar kerangka teoritis ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 : Kerangka Teoretis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah..

Sumber : Simanjuntak dan Ginting (2019)

Berdasarkan ketiga konsep kerangka teoritis diatas, maka kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian ini adalah kerangka teoretis menurut Panjaitan (2021) adalah sebagai berikut :



Gambar 2.4 : Kerangka Teoretis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah

Sumber : Panjaitan (2021)

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X₁) terhadap belanja daerah (Y).

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang digali dari potensi daerah. Tingginya PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah, yang mencerminkan daerah tersebut untuk memiliki otonomi lebih besar dalam menentukan prioritas belanja sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. PAD merupakan komponen yang penting dalam struktur keuangan daerah. PAD yang tinggi, memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja secara optimal sesuai prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah (Mardiasmo:2018).

Hubungan aloksi belanja daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika pendapatan asli daerah meningkat maka alokasi belanja juga akan meningkat

begitu juga sebaliknya apabila pendapatan asli daerah menurun maka belanja daerah juga menurun

Hal ini sejalan dengan penelitian Andrasari,dkk (2018) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah menghasilkan kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022.

2.4.2 Dana Perimbangan (X₂) terhadap Belanja daerah (Y) .

Dana perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Pendapatan ini memberikan jaminan pendanaan yang lebih stabil ketika PAD tidak menentu. Dana perimbangan merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Halim,2019). Adanya dana perimbangan, pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan berbagai proyek infrastruktur dan pelayanan publik yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan juga membantu daerah dalam menghadapi keterbatasan PAD, sehingga dapat menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Hubungan alokasi belanja dan dana perimbangan adalah dana transfer yang didapatkan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya digunakan oleh

pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhannya yang berupa belanja daerah untuk pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur contoh pengaspalan jalan, irigasi, dan lain-lain.

Hasil penelitian Rohmah dan Rahardjo (2023) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah menghasilkan kesimpulan Dana Transfer secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, muncul hipotesis penelitian :

H₂ : Dana Perimbangan(X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022.

2.4.3 Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X₃) terhadap Belanja daerah (Y)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak termasuk kategori utama pendapatan namun pendapatan ini diakui oleh peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat memberikan fleksibilitas tambahan dalam pengelolaan keuangan daerah (Halim,2019). Sumber-sumber penerimaan ini sering kali tidak terikat pada penggunaan tertentu sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikannya sesuai kebutuhan prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

Hubungan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah adalah lain-lain pendapatan ini dapat dijadikan diversifikasi berbagai sumber pendapatan yang sah,dapat digunakan untuk pembiayaan proyek dan program

pembangunan, dapat digunakan untuk subsidi layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Asari dan Suardana (2018) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah, menegaskan kesimpulan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja daerah. Oleh karena itu, muncul hipotesis penelitian:

H₃ : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (X₃) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah Kab/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian *Ex Post Facto* dengan jenis kausal komparatif. Menurut Raihan (2017:57) penelitian kausal komparatif ditujukan untuk membandingkan dua atau tiga peristiwa yang terjadi berdasarkan hubungan sebab-akibat dengan mencari penyebab dan mengamati akibat. Sehingga peneliti dapat mengidentifikasi fakta sebagai variabel dependen dan melakukan kajian terhadap variabel independen.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sesuai dengan judul penelitian yaitu Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022, menunjukkan bahwa terdapat variabel yang saling berpengaruh atau bersifat kausal karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah.

3.2 Variabel Penelitian

Menurut Rachman dan Wijayanti (2019:90) variabel adalah segala sesuatu yang dijadikan objek penelitian. Variabel-variabel ini merupakan faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti. Variabel yang akan digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

3.2.1. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Machali, 2021:64). Pada penelitian ini variabel independennya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

3.2.2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat (Machali, 2021:64). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja daerah.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang dibuat berdasarkan definisi konseptual yang merupakan pernyataan mengenai variabel, cara pengukuran dan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Belanja daerah atau yang biasa disebut dengan anggaran belanja daerah merupakan suatu rencana pengeluaran daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja yang telah disepakati oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat).

3.3.1. Pendapatan Asli Daerah (X₁)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari pengelolaan sumber-sumber kekayaan wilayahnya dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah digunakan oleh

pemerintah daerah untuk pendanaan dan pembangunan daerah sendiri. Pendapatan ini diukur berdasarkan realisasinya dengan menggunakan mata uang rupiah.

$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil}$ <p style="text-align: center;">Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (dalam Rupiah)</p>
--

Gambar 3. 1: Pendapatan Asli Daerah
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

3.3.2 Dana Perimbangan (X₂)

Dana perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan daerah. Dana perimbangan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Dana perimbangan pemerintah pusat yang terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana bagi hasil bukan pajak
 - c. Dana alokasi umum
 - d. Dana alokasi khusus
2. Dana perimbangan antar daerah atau yang biasa disebut dengan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan digunakan untuk belanja yang tidak didanai oleh pendapatan asli daerah untuk mengurangi *fiscal gap* antar daerah. Pendapatan ini diukur berdasarkan realisasinya dengan menggunakan mata uang rupiah.

3.3.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X₃)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan selain dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan ini diukur berdasarkan realisasinya dengan menggunakan mata uang rupiah.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Machali (2021:67) mengatakan bahwa "Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti." data yang didapatkan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35. Data yang akan diambil adalah tiga tahun periode yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

3.4.2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari objek yang akan diteliti dan dapat mewakili seluruh populasi dalam sebuah penelitian. Penelitian ini mempunyai populasi yang relatif kecil, yakni 35 kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022, sehingga dapat mengumpulkan populasi data secara lengkap.

3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah teknik yang mengambil contoh data yang valid dan reliabel untuk menggambarkan populasi yang sebenarnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah Kabupaten dan Kota

tidak terlalu besar, dengan menggunakan semua populasi yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota .

3.6 Jenis Data

a. Data Subyek (*Self-Report Data*)

Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Data subyek diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan, yaitu : lisan, tertulis, dan ekspresi. Respon tertulis diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuesioner) yang diajukan oleh peneliti.

b. Data Fisik (*Physical Data*)

Data fisik adalah jenis data penelitian yang berupa obyek atau benda-benda fisik seperti : bangunan, pakaian, buku dan lain sebagainya. Data fisik merupakan benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian masa lalu.

c. Data Dokumenter (*Dokumentari Data*)

Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian Indriantoro dan Supomo (2018:141).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data dengan cara mengolah melalui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dari 35 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, membaca literatur dan sumber lain yang mendukung proses

penulisan yang bertujuan untuk menambah pemahaman teori dari suatu permasalahan.

3.7 Sumber Data

Menurut Indrianto dan Supomo (2018:143), sumber data merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pengumpulan data, selain jenis data yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sumber data merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan metode pengumpulan data untuk menentukan asal objek data. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

- a.) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa perantara (Indriantoro dan Supomo, 2018). Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Beberapa teknik yang dapat peneliti gunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan penyebaran kuesioner.
- b.) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2018). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan keuangan, jurnal dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder karena berasal dari

berbagai sumber seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Undang-undang.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

3.8.1 Studi Pustaka

Dalam tahap studi pustaka, peneliti melakukan penelusuran dan analisis terhadap literatur yang relevan untuk memperoleh data dan membangun dasar teori yang sesuai dengan penelitian ini.

3.8.2 Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengakses dan mendokumentasikan data yang diperoleh dari sumber lain. Pada penelitian ini, data tertulis berupa realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2020 hingga tahun 2022 yang telah tersusun Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022.

3.9 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh simultan dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Selain menggunakan uji hipotesis, penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, heterokedastisitas, dan multikolinearitas), serta uji kekuatan model dan uji parsial. Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* yang merupakan program atau *software* yang digunakan untuk analisis data statistik.

3.9.1 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif merupakan salah satu metode yang penting dalam penelitian kualitatif untuk menggambarkan data dengan sistematis. Metode ini bertujuan untuk menyajikan karakteristik data seperti nilai rata-rata, median, modus, simpangan baku, dan rentang secara jelas dan rinci. Dengan menerapkan statistik deskriptif, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul, menggambarkan variasi data, serta memahami karakteristik utama dari distribusi data yang diamati.

3.9.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji nilai residu/ perbedaan yang ada dalam penelitian apakah terdistribusi normal atau tidak. Peneliti menggunakan nilai signifikansi dengan uji *Kolmogorof-Smirnov* dari program SPSS. Normalitas distribusi data dihitung dengan cara membandingkan nilai *Asymtotic Significance* yang diperoleh dengan nilai $\alpha = 0.05$. Apabila *Asymp Sig*

> 0.05 maka data dinyatakan normal, dan

< 0.05 maka data dinyatakan tidak normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk analisis regresi apakah terdapat variasi yang signifikan dalam residual penelitian. Jika variasi residualnya berbeda maka disebut heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji *Glejer*

pada program SPSS, dengan cara meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual. Apabila nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas lebih besar 0.05 dalam model regresi ini maka tidak terjadi heterokedastisitas begitu sebaliknya jika variabel bebas lebih kecil dai 0.05 maka terjadi heterokedastisitas.

c. Uji Multikolonieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas dilakukan dengan uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: Jika $VIF < 10$ dan nilai $Tolerance > 0,1$, maka antar variabel bebas (*independent variable*) tidak terjadi persoalan multikolinearitas .

3.9.3 Uji Kekuatan Model

3.9.3.1 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat penting dalam analisis regresi seberapa besar variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Semakin mendekati nilai 1, semakin kuat hubungan yang dijelaskan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.9.3.2 Analisis Hipotesis Uji F

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah secara bersama sama variabel independent mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel belanja daerah. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F_{hitung} hingga F_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Formulasi H_0 dan H_a

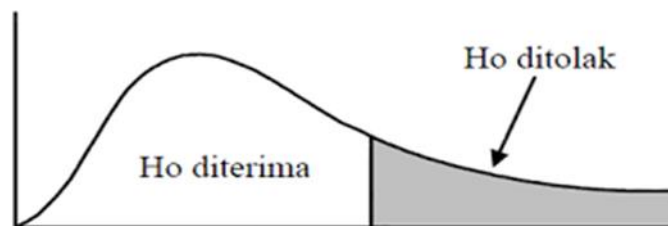
- H_0 : Tidak ada pengaruh penerimaan Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara simultan terhadap Belanja Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah.
- H_a : Ada pengaruh penerimaan Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara simultan terhadap Belanja Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah.

b. Menentukan nilai F_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% tingkat kesalahan (α) 5% = 0,05 dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df_1 = k$, k = Jumlah variabel bebas, $df_2 = n-k-1$ dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan terhadap variabel belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.

c. Menarik Kesimpulan

- H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau $Sig F < \alpha$ (0,05) artinya ada pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan terhadap belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.
- H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig F < \alpha$ (0,05) artinya tidak ada pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah, Dana

- Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3. 2 : Kurva Menarik Kesimpulan
Sumber : Ghozali, (2018).

3.9.4 Regresi Linier Berganda

Pengolahan data akan dikaji menggunakan alat analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\hat{y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Belanja daerah
α	: Nilai konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi variabel bebas
X_1	: Pendapatan asli daerah
X_2	: Dana Perimbangan
X_3	: Lain-lain pendapatan daerah yang sah
e	: Variabel pengganggu (<i>error</i>)

3.9.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji secara Simultan (Uji F)

Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan terhadap variabel belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai Fhitung hingga Ftabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merumuskan/menulis hipotesis, yaitu:

$H_0: \beta_1; \beta_2; \beta_3 = 0$, tidak ada pengaruh signifikan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.

$H_0: \beta_1; \beta_2; \beta_3 \neq 0$, ada pengaruh signifikan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

- b. Menentukan nilai Ftabel

Menentukan signifikansi, yaitu $\alpha = 0,05$ untuk uji dua sayap

dengan *degree of freedom*.

df pembilan = k

df penyebut = n-1-k

- c. Menghitung nilai Fhitung

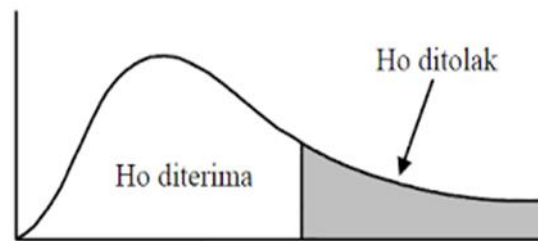
$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan:

R = koefisien korelasi linier berganda N = jumlah sampel

K = jumlah variabel bebas

d. Meletakkan Fhitung pada gambar kurva distribusi F



Gambar 3. 3 : Kurva distribusi F

Sumber : Ghozali, (2018).

e. Kesimpulan, ditarik dari penggambaran tersebut, maka dapat

ketentuan sebagai berikut:

- Ho ditolak dan Ha diterima apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau $Sig F < \alpha$ (0,05) artinya ada pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan terhadap belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.
- Ho diterima dan Ha ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig F < \alpha$ (0,05) artinya tidak ada pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
-

2. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah. Pada uji t ini dasar yang digunakan yaitu tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan dalam analisis (α) 5% dengan ketentuan *degree of freedom* (df) = $n-k$, di mana n adalah besarnya sampel, k adalah jumlah variabel. Model pengujian Uji t yaitu sebagai berikut:

a. Perumusan hipotesis

- $H_0 : b_1 = 0$, ada pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 secara parsial.
- $H_a : b_1 \neq 0$, ada pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 secara parsial.

b. Menentukan tingkat signifikansi, yaitu $\alpha = 0,05$ untuk uji sayap dengan *degree of freedom* (df) = $n - 1 - k$ untuk menentukan nilai tabel.

c. Menghitung nilai thitung

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

b_i = koefisien regresi

S_{b_i} = standar error koefisien regresi

- d. Meletakkan thitung pada gambar kurva distribusi



Gambar 3. 3 : kurva distribusi
Sumber : Ghozali, (2018).

- e. Kesimpulan, ditarik dari penggambaran tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut:

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ = H_0 ditolak
 Bila $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ = H_0 diterima

Berdasarkan $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima (koefisien regresi signifikan)
 bila nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).

3. Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengambil seberapa jauh variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi atau penentuan R^2 . Nilai R^2 ini berkisar antara 0- 1, semakin mendekati 1 nilai R^2 tersebut berarti semakin besar variabel independen mampu menerangkan variabel dependen. Analisis terhadap nilai R-square (R^2) ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas (X) dapat menerangkan hubungan perubahan variabel terikat (Y). Sifat-sifat R-square sangat dipengaruhi oleh

banyak variabel bebas di mana semakin banyak variabel bebas, maka semakin besar nilai R-square.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terletak pada $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 28,94% dari luas Pulau Jawa atau sekitar 32.800,69 KM². Provinsi ini berbatasan sebelah barat dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah yang terletak di bagian tengah pulau jawa dikenal sebagai pusat budaya Jawa.



Gambar 4. 1: Gambar Peta Provinsi Jawa Tengah
Sumber : Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Provinsi Jawa Tengah ini dibentuk pada zaman Hindia Belanda hingga tahun 1905. Sejak tahun 1930, Jawa Tengah ditetapkan sebagai daerah otonom terdiri dari 5 karisidenan. Pada saat ini Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota, serta administratif pemerintahannya memiliki 573

kecamatan, 7809 desa, dan 753 kelurahan. Sebelum otonomi daerah diberlakukan, Provinsi Jawa Tengah juga terdiri dari 3 kota administratif yaitu Kota Cilacap, Kota Purwokerto, dan Kota Klaten yang saat adanya otonomi daerah wilayahnya menjadi bagian dari kabupaten.

Tabel 4. 1 Tabel Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
1	Kabupaten Banjarnegara	20	12/266
2	Kabupaten Banyumas	27	30/301
3	Kabupaten Batang	15	9/239
4	Kabupaten Blora	16	24/271
5	Kabupaten Boyolali	22	6/261
6	Kabupaten Brebes	17	5/292
7	Kabupaten Cilacap	24	15/269
8	Kabupaten Demak	14	6/243
9	Kabupaten Grobogan	19	7/273
10	Kabupaten Jepara	16	11/184
11	Kabupaten Karanganyar	17	15/162
12	Kabupaten Kebumen	26	11/449
13	Kabupaten Kendal	20	20/266
14	Kabupaten Klaten	26	10/391
15	Kabupaten Kudus	9	9/123
16	Kabupaten Magelang	21	5/367
17	Kabupaten Pati	21	5/401
18	Kabupaten Pekalongan	19	13/272
19	Kabupaten Pemasang	14	12/212
20	Kabupaten Purbalingga	18	15/224
21	Kabupaten Purworejo	16	25/469
22	Kabupaten Rembang	14	7/287
23	Kabupaten Semarang	19	27/208
24	Kabupaten Sragen	20	12/196
25	Kabupaten Sukoharjo	12	17/150
26	Kabupaten Tegal	18	6/281
27	Kabupaten Temanggung	20	23/266
28	Kabupaten Wonogiri	25	43/251

29	Kabupaten Wonosobo	15	29/236
30	Kota Magelang	3	17/-
31	Kota Pekalongan	4	27/-
32	Kota Salatiga	4	23/-
33	Kota Semarang	16	177/-
34	Kota Surakarta	5	51/-
35	Kota Tegal	4	27/-

Sumber: BPS, 2024

Kondisi topografi provinsi ini meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah Pulau Jawa. Dataran rendah Provinsi Jawa tengah terletak sepanjang pesisir pantai selatan maupun pantai utara. Tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah yaitu 38% memiliki tingkat kemiringan 0-2%, 31% memiliki kemiringan 2-15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya 12% memiliki kemiringan lebih dari 40%. Memiliki kondisi wilayah dengan beberapa gunung berapi yang masih aktif, membuat Provinsi Jawa Tengah ini subur. Sumber daya alamnya berupa perkebunan, pertanian, perikanan, hingga sumber daya energi.

Sektor utama perekonomian di Jawa Tengah yaitu pertanian, hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Grobogan merupakan wilayah penghasil kayu jati karena sebagian kawasannya adalah hutan. Daerah industri Jawa Tengah terletak Di Kota Semarang, Kabupaten Ungaran, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Kendal. Industri batik yang terkenal terletak di Kota Solo dan Pekalongan. Industri lainnya yaitu semen yang terletak di Kabupaten Cilacap. Wilayah Cepu juga terkenal dengan cadangan minyak buminya.

Menurut data BPS jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada

tahun 2023 sebesar 37.540.962 jiwa. Jumlah ini terbesar ketiga dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk Jawa Tengah kurang lebih 0,67% per tahun. Mayoritas penduduk provinsi ini adalah suku jawa, walaupun ada etnis tionghoa dan juga etnis arab. Menurut data BPS tahun 2022 angkatan kerja penduduk Jawa Tengah yaitu 70, 84%. Berikut tabel persentase penduduk bekerja menurut BPS :

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Bekerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Lapangan Pekerjaan Utama	Persentase Penduduk Bekerja Tahun 2020-2022		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	66.28	23.74	4.78
Pertambangan & Penggalian	0.62	00.58	0.46
Industri Pengolahan	20.64	22.17	21.89
Pengadaan Listrik dan Gas	0.22	0.18	0.15
Treatment Air, Treatment Air Limbah, dan Aktifitas Remediasi	0.29	0.42	0.31
Konstruksi	8.01	8.29	0.06
Perdagangan Besar & Eceran	19.03	9.47	9.39
Transportasi & Pergudangan	2.95	0.84	2.79
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7.50	7.79	00.64
Informasi & Komunikasi	0.46	0.53	00.56
Aktivitas Keuangan & Asuransi	1.15	0.13	1.10
Real Estate	0.08	0.09	00.09
Jasa Profesional & Perusahaan	1.12	10.11	0.96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	1.82	10.90	10.94
Pendidikan	4.01	4.21	40.08
Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	1.32	10.38	1.36
Jasa Lainnya	4.51	40.18	40.44

Sumber : BPS, diolah 2024

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masing-masing mempunyai karakteristik keuangan. Pendapatan daerah yang didapatkan oleh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berasal dari:

1. Pajak daerah : pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pbb, dan sebagainya.
2. Retribusi daerah : retribusi pasar, retribusi parkir dan lain-lain.
3. Dana perimbangan : Dana alokasi umum (DAU) , dana alokasi khusus (DAK) dan Dana bagi hasil (DBH) dari pusat.
4. Pendapatan sah lainnya : jasa giro, hibah, bantuan social.

Pendapatan tersebut dipergunakan untuk membiayai belanja daerah yang mencakup :

1. Belanja operasional : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan.
2. Belanja modal : digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan investasi lainnya.
3. Belanja tidak terduga : cadangan anggaran untuk keperluan mendesak dan tidak terduga seperti bencana alam.

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dalam penatausahaan keuangannya Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem

berbasis teknologi. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat daerah.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-rata, serta standar deviasi (Ghozali:2018). Berikut tabel hasil analisis deskriptif:

Tabel 5. 1 Tabel Analisis Deskriptif (Dalam Milyar Rupiah)

	N	Mini mum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah	105	798.3 5	4871.95	2254.5790	710.86287
PAD	105	219.5 4	2545.99	454.5645	344.53444
Dana Perimbangan	105	542.5 8	2314.53	1540.6928	435.46005
LPDS	105	65.81	672.51	254.26718	111.90181

Sumber : Data diolah, 2024

Dari tabel diatas, data yang diuji oleh peneliti adalah 105 data, dan dapat dijelaskan bahwa terdapat nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata serta standart deviasi masing-masing variabel untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022. Penjelasan nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata variabel tersebut sebagai berikut:

1. Belanja Daerah

Berdasarkan hasil olah data tersebut, bahwa belanja daerah yang paling rendah adalah Kota Magelang pada tahun 2020 hanya sebesar

Rp 798,25 miliar rupiah, sedangkan belanja tertinggi adalah Kota Semarang yaitu 4871,95 miliar rupiah. Nilai mean pada belanja daerah 2254.5790 ini memberikan gambaran bahwa rata-rata uang yang dikeluarkan untuk belanja daerah selama tahun 2020-2022. Nilai standart deviasi sebesar 710.86287 menunjukkan bahwa setiap daerah mempunyai belanja daerah yang tidak sama antar daerah dan nilai belanja daerah bervariasi.

2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil olah data tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) yang terendah adalah Kota Salatiga yaitu sebesar Rp 219,54 miliar rupiah pada tahun 2020 hal ini dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* mengakibatkan target PAD Kota Salatiga menjadi turun dan PAD tertinggi yaitu Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 2545,99 miliar rupiah. Nilai mean pendapatan asli daerah adalah 454.5645 ini menggambarkan bahwa rata-rata uang yang diterima sebagai pendapatan asli daerah. Nilai standart deviasi sebesar 344.53444 menunjukkan bahwa setiap daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang bervariasi.

3. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dari hasil olah data tersebut nilai terendah yaitu Kota Magelang, dana perimbangan yang didapatkan oleh Kota Magelang pada tahun 2022 hanya sebesar Rp 542,58 miliar rupiah, dan dana perimbangan tertinggi adalah Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebesar 2.314,53 miliar rupiah. Nilai mean dana perimbangan adalah 1540.6928 ini menggambarkan bahwa rata-rata uang yang diterima sebagai dana

perimbangan. Nilai standart deviasi sebesar 435.46005 menunjukkan bahwa setiap daerah mempunyai dana keseimbangan yang bervariasi.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah dari hasil olah data tersebut nilai terendah yaitu Kota Magelang sebesar 65,81 milyar rupiah pada tahun 2022 hanya sebesar Rp 542,58 milyar rupiah, dan yang tertinggi adalah Kota Semarang sebesar 672,51 milyar rupiah. Nilai mean lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 254.26718 menggambarkan bahwa rata-rata uang yang diterima sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nilai standart deviasi sebesar 111.90181 menunjukkan bahwa setiap daerah mempunyai lain-lain pendapatan daerah yang sah bervariasi.

5.2 Uji Asumsi Klasik

5.2.1 Uji Normalitas

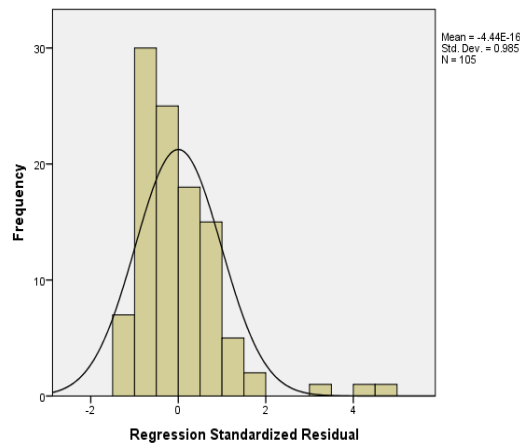
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ini apakah variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Berikut hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-smirnov:

Tabel 5. 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Ke-1

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	137.9887239
Most Extreme Differences	Absolute	.143
	Positive	.143
	Negative	-.123
Test Statistic		.143
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000

Sumber: Data diolah, 2024

Asumsi normalitas suatu data adalah data yang terdistribusi secara normal dengan nilai signifikasni $>0,05$, namun hasil olah data tersebut menyatakan bahwa data tersebut tidak normal dengan nilai signifikansi 0,00 karena terdapat beberapa data yang outliers. Berikut adalah grafik histogram data sebelum ditrasformasi



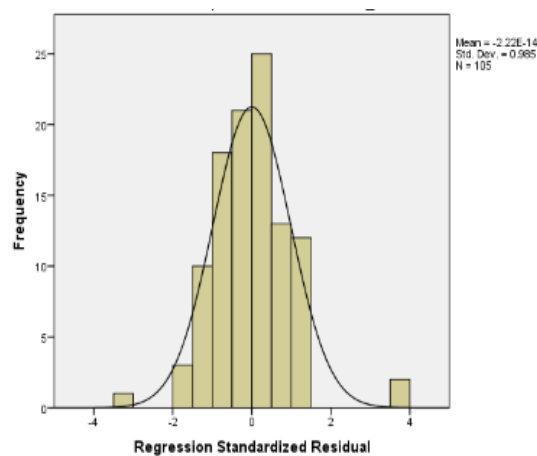
Gambar 5. 1 : Histogram Uji Normalitas
Sumber : Hasil SPSS, 2024

Menurut Ghozali (2018:32) data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi agar menjadi normal dengan melihat bentuk grafik histogram data, dari data tersebut gambar grafik membentuk positive skewness sehingga peneliti melakukan transformasi atas data tersebut dengan bentuk transformasi data LN (log natural). Berikut hasil setelah transformasi data:

Tabel 5. 3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Ke-2

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09059620
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.048
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.183

Sumber: Data diolah, 2024



Gambar 5. 2 : Hasil uji kolmogorov-smirnov

Sumber : Hasil SPSS, 2024

Hasil uji kolmogorov-smirnov yang kedua menghasilkan nilai signifikansi $0.183 > 0,05$ sehingga data terdistribusi secara normal setelah dilakukan transformasi data.

5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

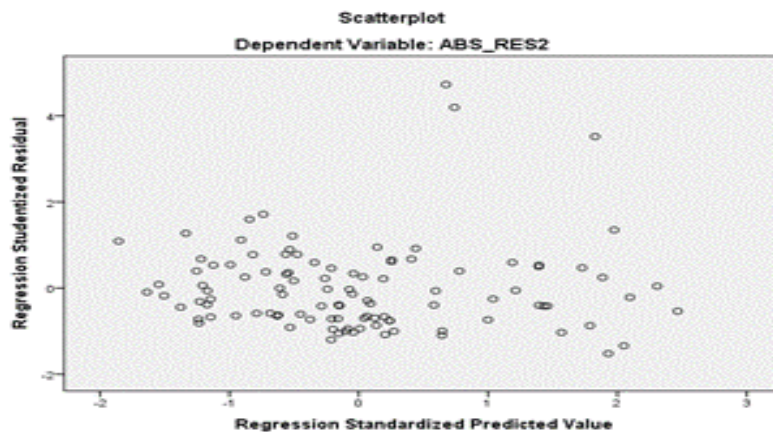
Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah kesalahan pengganggu dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik heteroskedastisitas untuk memprediksi nilai variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardied Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.033	.114		-.290	.773
X ₁	0.24	.021	.161	1.164	.247
X ₂	-2.473	.000	-.177	-1.405	.163
X ₃	-3.094	.000	-.056	-.347	.729

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil olah data uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa PAD, dana derimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas antara variabel dependen dan variabel independen dapat ditunjukkan pada gambar scatterplot dibawah ini:



Gambar 5. 2 : Hasil scatterplot
Sumber : Hasil SPSS, 2024

5.2.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:107) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Hasil dari perhitungan uji multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.420	.171			
	X ₁	.213	.031	.254	.498	2.008
	X ₂	.001	.000	.689	.604	1.657
	X ₃	.001	.000	.177	.364	2.750

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tersebut, data yang telah diolah tersebut, nilai *tolerance* semua variable independen lebih dari 0,10 dan semua nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu nilai *tolerance* PAD 0,498 > 0,10, dana perimbangan 0,604 > 0,10, lain-lain pendapatan daerah yang sah bernilai 0,364 > 0,10 dan nilai VIF PAD 2,008 < 10, nilai VIF dana perimbangan 1,657 < 10, dan nilai VIF lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah 2,750 > 10 dan antar variabel tidak terjadi multikolinearitas.

5.3 Uji Kekuatan Model

5.3.1 Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018: 97) koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel-variabel dependen. Jika nilai R^2 mendekati 1 berarti model regresi hampir semua menjelaskan semua variasi dalam data dependen dan jika nilai R^2 mendekati 0 maka model regresi hanya menjelaskan sedikit dari semua variasi data dependen.

Berikut tabel analisis koefisien determinasi:

Tabel 5. 6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.965 ^a	.931	.929	.09193

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai koefisien determinasi (R^2) pada olah data tersebut menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,929 atau sebesar 92,9% variasi PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisanya yaitu 7,1 % yang didapatkan dari 100% - 92,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Pada hasil uji

ini, nilai R² sebesar 0,931 dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen tinggi.

5.3.2 Analisis Hipotesis Uji F (Simultan)

Uji F merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan dengan ketentuan sebagai berikut :

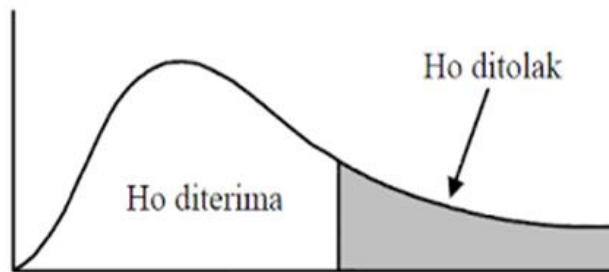
1. Menentukan Hipotesis :
 - a. Jika nilai F hitung > F tabel atau nilai Sig < 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.
 - b. Jika nilai F hitung < F tabel atau nilai Sig > 0,05, maka H₀ diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.
2. Menentukan derajat kebebasan:
 - Taraf signifikan = 0,05
 - Derajat kebebasan = (n-k-1) = 105-3-1 = 101
 - F tabel 2,69
3. Perhitungan untuk Ftabel:

Tabel 5. 7 Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	11.453	3	3.818	451.733	.000 ^b
Residual	.846	102	.008		
Total	1.149	104			

Sumber: Data diolah, 2024

4. Gambar



5. Menarik kesimpulan :

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dan gambar kurva diatas, dimana F tabel 2,69 sedangkan F hitung 451,733 berarti F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

5.4 Analisis Hasil Regresi Linier Berganda

Analisa ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2), lain-lain pendapatan daerah yang sah (X_3) terhadap belanja daerah (Y). Hasil output regresi linier dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5. 8 Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.420	.171		31.712	.000
	X_1	.213	.031	.254	6.833	.000
	X_2	.001	.000	.689	20.414	.000
	X_3	.001	.000	.177	4.069	.000

Sumber: Data diolah, 2024

5.5 Hasil Uji T (Parsial)

Bila hasil perhitungan dari *print out* komputer dengan bantuan program SPSS versi 23.00 dimasukkan ke dalam persamaan di atas diperoleh nilai sebesar :

$$\hat{y} = 5,429 + 0,213X_1 + 0,001X_2 + 0,001X_3 + e$$

Dari persamaan di atas memiliki arti bahwa :

- a. Konstanta a sebesar 5,429 dapat diartikan koefisien konstanta yang bernilai positif maka artinya jika PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah bernilai 0, maka belanja daerah nilainya Rp 5,429.
- b. Koefisien regresi $b_1 = 0,213$ artinya apabila variabel PAD (X_1) meningkat maka belanja daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,213, dengan asumsi variabel dana perimbangan (X_2), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (X_3), dianggap konstan.
- c. Koefisien regresi $b_2 = 0,001$ artinya apabila variabel dana perimbangan (X_2) meningkat maka belanja daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,001, dan sebaliknya dengan asumsi variabel PAD (X_1), lain-lain pendapatan daerah yang sah (X_3) dianggap konstan.
- d. Koefisien regresi $b_3 = 0,001$ artinya apabila variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah (X_3) meningkat maka belanja daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,001 dengan asumsi variabel PAD (X_1), dana perimbangan (X_2) dianggap konstan.

Menurut Ghozali (2018:97) uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat signifikansi (sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig $\alpha = 0,05$:

- Jika nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai Sig. $<$ 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- Jika nilai t hitung $<$ t tabel atau nilai Sig. $>$ 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Nilai t tabel = $(\alpha/2; n-k-1) = (0,05/2; 105-3-1) = (0,025 ; 101) = 1,98$.

Hasil uji secara parsial sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X₁) terhadap Belanja daerah (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Untuk mengetahui signifikansi dari hasil, maka perlu dilakukan beberapa uji sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis

H₀ : $b_1 = 0$, tidak ada pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

H_a : $b_1 \neq 0$, ada pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah

b. Menentukan *level of significance* sebesar 95% ($\alpha = 0,05$)

Derajat kebebasan (df) = $n-1-k$.

Dimana : $n = 105$, $k = 3$, $df = 105 - 1 - 3 = 101$

taraf signifikansi (α) = 0,05 atau 5%, taraf nyata = 95 %

Dari t tabel dengan $\alpha = 5\%$ (karena dua sisi, $\alpha = 0,05 / 2 = 0,025$)

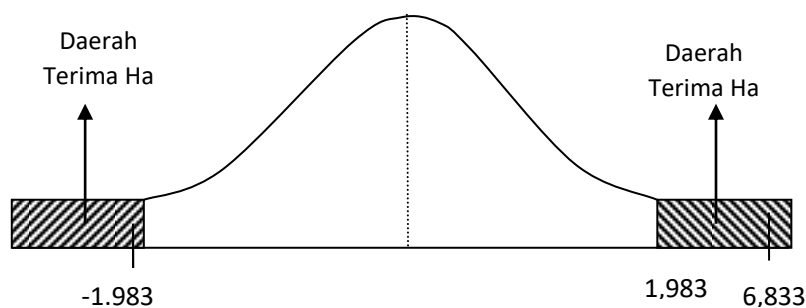
diperoleh nilai kritis = 1,983 (Tabel t).

c. Perhitungan untuk t hitung

$$t = b/Sb$$

$$t = 0.213/0,31 = 6,833$$

d. Meletakkan thitung pada gambar kurva distribusi t



e. Buat kesimpulan, dengan menerima H_0 atau menolak H_0 . Dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dan gambar kurva diatas, dimana t tabel 1,983 sedangkan t hitung 6,833 berarti $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh terhadap belanja daerah (Y).

- f. Dari hasil uji SPSS diketahui bahwa nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak berarti ada pengaruh signifikan antara variabel pendapatan asli daerah dan belanja daerah.

2. Pengaruh Dana Perimbangan (X_2) terhadap Belanja daerah (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Untuk mengetahui signifikansi dari hasil, maka perlu dilakukan beberapa uji sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis

$H_o : b_1 = 0$, tidak ada pengaruh antara variabel dana perimbangan terhadap belanja daerah.

$H_a : b_1 \neq 0$, ada pengaruh antara variabel dana perimbangan terhadap belanja daerah.

b. Menentukan *level of significance* sebesar 95% ($\alpha = 0,05$)

Derajat kebebasan (df) = $n-1-k$.

Dimana : $n = 105$, $k = 3$, $df = 105 - 1 - 3 = 101$

taraf signifikansi (α) = 0,05 atau 5%, taraf nyata = 95 %

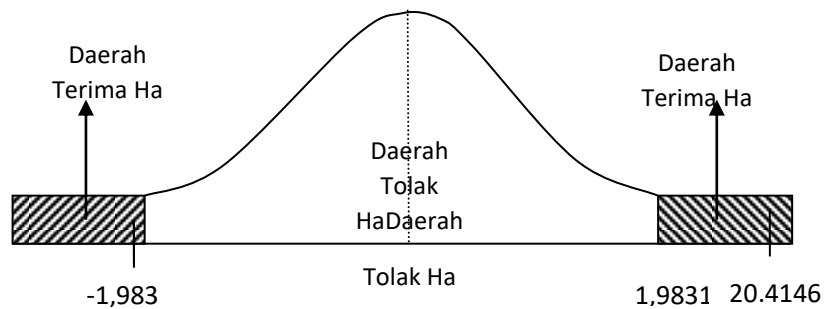
Dari t tabel dengan $\alpha = 5\%$ (karena dua sisi, $\alpha = 0,05 / 2 = 0,025$) diperoleh nilai kritis = 1,983 (Tabel t).

c. Perhitungan untuk t hitung

$$t = b/S_b$$

$$t = 0.001/0.000048985 = 20,414$$

d. Meletakkan thitung pada gambar kurva distribusi t



e. Buat kesimpulan, dengan menerima H_0 atau menolak H_0 . Dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dan gambar kurva diatas, dimana t tabel 1,983 sedangkan t hitung 20.414 berarti t hitung $>$ t tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel dana perimbangan (X_2) berpengaruh terhadap belanja daerah.

f. Dari hasil uji SPSS diketahui bahwa nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak berarti ada pengaruh signifikan antara variabel dana perimbangan dan belanja daerah.

3. Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (X_3) terhadap Belanja daerah (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Untuk mengetahui signifikansi dari hasil, maka perlu dilakukan beberapa uji sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis

$H_0 : b_1 = 0$, tidak ada pengaruh antara variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah.

$H_a : b_1 \neq 0$, ada pengaruh antara variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah.

b. Menentukan *level of significance* sebesar 95% ($\alpha = 0,05$)

Derajat kebebasan (df) = $n-1-k$.

Dimana : $n = 105$, $k = 3$, $df = 105 - 1 - 3 = 101$

taraf signifikansi (α) = 0,05 atau 5%, taraf nyata = 95 %

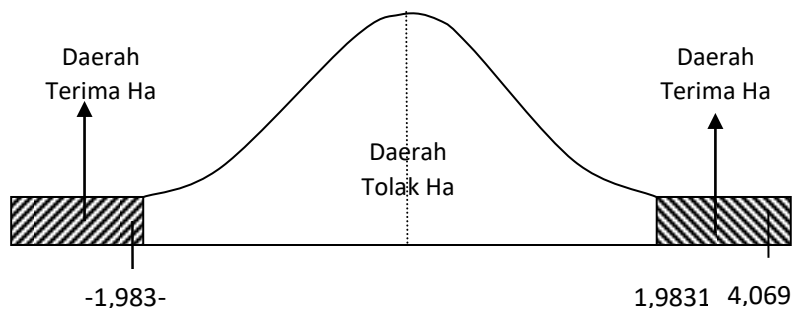
Dari t tabel dengan $\alpha = 5\%$ (karena dua sisi, $\alpha = 0,05 / 2 = 0,025$) diperoleh nilai kritis = 1,983 (Tabel t).

c. Perhitungan untuk t hitung

$$t = b/Sb$$

$$t = 0.001/0.000024576 = 4,069$$

d. Meletakkan t_{hitung} pada gambar kurva distribusi t



e. Buat kesimpulan, dengan menerima H_0 atau menolak H_0 . Dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dan gambar kurva diatas, dimana t tabel 1,983 sedangkan t hitung 4.069 berarti t hitung $>$ t tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel dana perimbangan (X_2) berpengaruh terhadap belanja daerah.

f. Dari hasil uji SPSS diketahui bahwa nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak berarti ada pengaruh signifikan antara variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah dan belanja daerah.

5.6 Pembahasan

5.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) Terhadap Alokasi Belanja

Daerah (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Berdasarkan hasil uji penelitian di atas maka hipotesis pertama diduga terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diterima. Nilai t dari PAD adalah 6,833 lebih besar dari nilai t tabel 1,98 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Koefisien PAD sebesar 0,231, maka terjadi hubungan positif antara PAD dan belanja daerah. Jika PAD mengalami peningkatan 1% maka Belanja daerah akan meningkat sebesar 0,231. Peningkatan belanja daerah akan berdampak pada pelayanan publik yang semakin baik serta kesejahteraan masyarakat di

wilayahnya dan peningkatan pendapatan asli daerah ini menunjukkan kemandirian daerahnya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah digunakan untuk mendanai kebutuhan fiskal daerah yang untuk menjalankan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan langsung yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain PAD yang sah. PAD digunakan untuk membiayai berbagai program seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan operasional lainnya, termasuk peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aminus (2018), Asari dan Suardana (2018), dan Andrasati,dkk (2018), serta Rohma dan Rahardjo (2023) bahwa PAD mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Wahab (2021) bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah di Kota Jayapura. Hasil uji penelitiannya pada uji parsial menunjukkan nilai thitung PAD adalah -0.241 berarti PAD memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura.

5.6.2 Pengaruh Dana Perimbangan (X₂) Terhadap Belanja daerah (Y)

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Hasil uji penelitian ini memperoleh hipotesis pertama diduga ada pengaruh antara dana perimbangan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diterima. Nilai t dari dana perimbangan adalah 20,414 lebih besar dari nilai t tabel 1,98 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ sehingga setiap kenaikan 1% dana perimbangan maka alokasi belanja daerah naik 20,414. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan dana perimbangan digunakan untuk membantu pemerataan daerah dalam pemerataan yang dialokasikan untuk belanja daerah yang bersifat penting seperti pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dana perimbangan merupakan pendapatan dari pemerintah pusat seperti DAU, DAK, dan DBH untuk membiayai kegiatan operasional dan program pembangunan atau sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dana perimbangan ini mempunyai peran penting dalam menyeimbangkan kapasitas fiskal antar daerah dan memastikan pemerataan pembangunan. Adanya dana perimbangan ini, pemerintah daerah dapat lebih fokus untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Hal ini sesuai dengan penelitian Rohmah dan Rahardjo (2023), Aminus (2018), serta Asari dan Suardana (2018) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian dari Wage dan Effendi (2023) bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil uji penelitiannya menunjukkan

bahwa signifikansi hasil uji t adalah 0,467 dan hasil uji simultan menunjukkan nilai f hitung 0,55 dengan nilai signifikansi 0,946.

5.6.3 Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (X3) Terhadap Belanja daerah (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Hasil uji penelitian ini memperoleh hipotesis diduga terdapat pengaruh antara lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diterima. Nilai t dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah 4,069 lebih besar dari nilai t tabel 1,98 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ sehingga setiap kenaikan 1% dana perimbangan maka alokasi belanja daerah naik 4,069. Hasil ini menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah digunakan untuk berbagai alokasi program daerah seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, atau penanggulangan bencana,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lain-lain pendapatan daerah yang sah digunakan untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Adanya lain-lain pendapatan daerah yang sah ini, pemerintah daerah dapat bertindak cepat dalam menangani bencana, serta memastikan bahwa bantuan dan dukungan tersedia bagi masyarakat yang terdampak. Tindakan ini membuktikan bahwa pemerintah daerah mempunyai komitmen dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya .

Hal ini sesuai dengan penelitian Asari dan Suardana (2018) dan penelitian Andrasari, dkk (2018) bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rohmah dan Rahardjo (2023) serta Susilowati, dkk (2021) bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil olah data dengan program SPSS serta pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Saran Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
 1. Melihat Pendapatan Asli Daerah yang sudah cukup baik mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi persentase pendapatan asli daerah masih harus ditingkatkan untuk menyeimbangkan dengan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah agar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah semakin mandiri dalam menjalankan pemerintahannya.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah , melihat banyak anggaran dengan realisasi APBD per tahunnya yang tidak tercapai 100% atau tidak terealisasi seluruhnya, penyusunan Rancangan APBD diharapkan lebih realistis dan rasional.
- b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memasukkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi Belanja Daerah seperti pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya serta menggunakan kerangka teoretis yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminus, Rahmi. (2018). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir”*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 5(2), 99-108.
- Andrasari, Y., dkk. (2019). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016)”*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah, 10(1), 45-58.
- Asari, I. G. A. S., & Suardana, M. (2018). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Belanja Daerah”*. Jurnal Ilmu Ekonomi, 13(2), 89-104.
- BPS Jateng (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah). (2022). *“Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2020”*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- _____. (2022). *“Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2022”*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Elsye, E. (2020). *“Alokasi Keuangan Daerah”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ferdiasyah, dkk. (2018). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah”*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 15(3), 115-130.
- Febriyanti, E.M. (2022). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah”*. Jurnal Mirai Management, 7(3), 629-637.
- Ghozali, Imam. (2018). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2019). *“Pengelolaan Keuangan Daerah”*. Jakarta: Salemba Empat.

- Indriantoro, N., dan Supomo, B. (2018). *“Metode Penelitian Bisnis”*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Machali, I. (2021). *“Metode Penelitian Kuantitatif”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2018). *“Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah”*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Raihan, M. (2017). *“Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah”*. Jurnal Ekonomi, 12(1), 72-82.
- Rohmah, F.N., & Rahardjo, S.N. (2023). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah”*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 20(1), 15-28.
- Rubiyanto, I., & Rahayu, S. (2019). *“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto”*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan, 8(2), 25-38.
- Sarsiti. (2020). *“Akuntansi Sektor Publik”*. Cirebon: Green Publisher Indonesia
- Simanjuntak, S., & Ginting, M. (2019). *“Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara”*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 7(3), 87-101.
- Siregar, Baldric (2017). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIE YKPN.
- Sugiyono. (2015). *“Metode Penelitian Kuantitatif”*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, D., Sitingak, C.A.D & Juwari (2021). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah”*. Jurnal Geoekonomi, 6(1), 2086-1117.
- Republik Indonesia. 2014. UU No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2019. PP No. 19 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wage, H., & Effendi, S. (2023). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah”*. SNISTEK, 5, 405-412.

- Wahab, La Ode Abdul. (2021). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura”*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Port Numbay, 12 (1), 25-41.
- Yudanti,A.F.,& Kurnia. (2022). *“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Lokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat”*. Jurnal Ekonomi Daerah, 5(3), 123-135.

LAMPIRAN

Laporan Realisasi Anggaran dan Hasil Olah Data SPSS

Kabupaten dan Kota	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Rupiah)					
	Pendapatan			Belanja		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kabupaten Cilacap	3.219.631.963	3.334.300.291	3.293.132.139	3.219.631.963	3.329.814.717	3.402.035.621
Kabupaten Banyumas	3.773.568.764	3.487.722.900	3.426.408.182	3.773.568.764	3.430.884.286	3.600.847.367
Kabupaten Purbalingga	2.104.113.319	2.054.843.645	2.022.884.630	2.104.113.319	1.999.904.830	2.122.762.528
Kabupaten Banjarnegara	2.259.878.404	2.086.059.742	2.044.546.403	2.259.878.404	2.042.019.297	2.039.210.930
Kabupaten Kebumen	3.044.056.768	2.832.035.016	2.847.196.017	3.044.056.768	2.779.840.698	2.824.358.294
Kabupaten Purworejo	2.483.287.920	2.290.242.968	2.185.997.980	2.483.287.920	2.135.478.214	2.347.131.165
Kabupaten Wonosobo	2.070.280.635	1.967.781.050	1.921.189.093	2.070.280.635	1.860.097.991	2.011.113.250
Kabupaten Magelang	2.719.200.678	2.469.754.315	2.558.024.177	2.719.200.678	2.413.163.789	2.570.326.002
Kabupaten Boyolali	2.480.627.139	2.430.235.209	2.372.372.551	2.480.627.139	2.268.508.827	2.471.827.429
Kabupaten Klaten	2.907.327.298	2.570.037.777	2.587.693.433	2.907.327.298	2.493.406.882	2.527.619.332
Kabupaten Sukoharjo	2.401.529.962	2.119.633.371	2.014.818.262	2.401.529.962	2.089.455.559	2.042.027.815
Kabupaten Wonogiri	2.477.910.262	2.303.564.899	2.262.263.892	2.477.910.262	2.297.510.694	2.243.214.085
Kabupaten Karanganyar	2.346.436.745	2.165.983.749	2.251.540.155	2.346.436.745	2.138.939.585	2.203.430.151
Kabupaten Sragen	2.422.886.893	2.336.721.728	2.177.840.072	2.422.886.893	2.160.877.776	2.306.325.555
Kabupaten Grobogan	2.680.645.523	2.634.888.674	2.588.637.777	2.680.645.523	2.428.631.674	2.687.129.832
Kabupaten Blora	2.012.812.302	2.227.065.270	2.176.850.306	2.012.812.302	2.113.773.066	2.396.215.622
Kabupaten Rembang	2.054.302.198	1.911.328.505	1.841.484.139	2.054.302.198	1.836.443.012	1.991.790.018
Kabupaten Pati	2.910.220.672	2.725.202.351	2.705.053.758	2.910.220.672	2.623.732.654	2.717.685.027
Kabupaten Kudus	1.911.471.464	2.163.634.438	2.078.759.802	1.911.471.464	1.879.122.990	2.231.500.774
Kabupaten Jepara	2.399.062.011	2.380.695.935	2.326.937.014	2.399.062.011	2.309.409.464	2.429.312.218
Kabupaten Demak	2.400.405.766	2.365.244.760	2.402.717.870	2.400.405.766	2.336.015.726	2.487.342.627
Kabupaten Semarang	2.457.006.194	2.417.282.770	2.337.453.499	2.457.006.194	2.198.880.662	2.536.331.344
Kabupaten Temanggung	1.996.489.275	1.971.005.990	1.895.483.914	1.996.489.275	1.877.969.167	1.958.748.410
Kabupaten Kendal	2.451.834.514	2.300.543.642	2.265.353.925	2.451.834.514	2.069.958.007	2.499.014.019
Kabupaten Batang	1.925.617.426	1.821.822.581	1.750.957.035	1.925.617.426	1.780.425.132	1.801.913.436
Kabupaten Pekalongan	2.446.656.142	2.078.543.513	2.074.624.015	2.446.656.142	2.075.043.160	2.123.953.846
Kabupaten Pemasang	2.836.842.885	2.605.029.836	2.493.418.191	2.836.842.885	2.524.558.785	2.504.262.139
Kabupaten Tegal	2.905.805.253	2.862.559.366	2.743.700.526	2.905.805.253	2.776.664.042	2.722.064.918
Kabupaten Brebes	3.293.494.179	3.162.140.424	2.989.821.991	3.293.494.179	3.126.226.471	3.091.285.560
Kota Magelang	1.006.107.354	994.366.988	985.763.798	1.006.107.354	935.047.734	1.039.501.503
Kota Surakarta	1.624.395.242	1.939.268.857	2.028.438.691	1.624.395.242	1.866.496.348	2.088.323.396
Kota Salatiga	1.006.404.906	946.191.088	918.353.780	1.006.404.906	956.501.305	932.071.471
Kota Semarang	5.319.832.790	4.822.887.282	4.969.436.543	5.319.832.790	4.764.045.946	4.871.946.697
Kota Pekalongan	1.060.107.482	966.372.557	989.013.075	1.060.107.482	962.091.792	1.031.090.188
Kota Tegal	1.298.031.100	1.030.986.510	1.042.635.845	1.298.031.100	1.089.705.697	1.127.738.113
Provinsi Jawa Tengah	84.708.281.428	80.775.977.995	79.570.802.482	84.708.281.428	77.970.645.979	81.981.450.683

Hasil Input SPSS

16:

	X1	X2	X3	Y	RES_1	LN.Pendpt.Asli.Daerah	LN.Alokasi.Belanja.Daerah	RES_2	ABS_RES2
1	236.48	1529.87	226.10	2030.53	29.02792	5.47	7.62	.08717	.09
2	668.21	2272.42	389.56	3249.14	-55.19698	6.50	8.09	-.15219	.15
3	257.42	1288.77	186.90	1662.51	-85.22727	5.55	7.42	.02019	.02
4	229.69	1574.02	254.24	2109.12	48.74807	5.44	7.65	.09228	.09
5	451.54	1680.23	250.63	2339.81	-45.29339	6.11	7.76	-.00293	.00
6	392.54	2200.76	415.07	2955.05	-22.63290	5.97	7.99	-.10918	.11
7	591.34	2123.41	437.65	3088.83	-22.82616	6.38	8.04	-.12274	.12
8	439.69	1276.25	617.79	2285.74	55.85687	6.09	7.73	-.00283	.00
9	350.45	1811.35	367.08	2511.27	7.22070	5.86	7.83	-.01214	.01
10	419.36	1581.18	314.72	2268.05	-31.13312	6.04	7.73	.00012	.00
11	384.68	1497.21	239.49	2092.03	-32.31873	5.95	7.65	.02377	.02
12	403.03	2079.49	285.71	2737.86	-32.01056	6.00	7.91	-.05556	.06
13	356.75	1521.60	253.10	2041.11	-90.46768	5.88	7.62	-.00535	.01
14	329.96	1954.41	293.74	2545.16	-30.90160	5.80	7.84	-.02303	.02
15	383.89	1420.72	211.57	1914.63	-110.55403	5.95	7.56	-.00806	.01
16	329.77	1781.72	268.96	2304.38	-77.33053	5.80	7.74	-.01590	.02
17	371.71	1970.80	319.87	2739.80	86.70184	5.92	7.92	.00228	.00
18	341.90	1511.24	208.66	2053.02	-20.85258	5.83	7.63	.03924	.04
19	328.38	1816.25	304.38	2644.99	203.56371	5.79	7.88	.08502	.09
20	313.62	1420.76	218.37	1894.88	-65.91831	5.75	7.55	.02087	.02
21	304.80	1652.29	209.86	2126.67	-55.23820	5.72	7.66	.02238	.02
22	326.67	1368.62	183.08	1830.78	-63.95957	5.79	7.51	.02502	.03

Hasil Input SPSS

	X1	X2	X3	Y	RES_1	LN.Pendpt.Asli.Daerah	LN.Alokasi.Bellanja.Daerah	RES_2	ABS_RES2
22	326.67	1368.62	183.08	1830.78	-63.95957	5.79	7.51	.02502	.03
23	442.53	1481.59	287.15	2191.41	-8.97633	6.09	7.69	.02288	.02
24	394.46	1567.93	250.43	2130.44	-83.65978	5.98	7.66	-.00738	.01
25	469.54	1215.82	355.04	2703.08	697.35011	6.15	7.90	.32623	.33
26	439.93	1900.44	311.40	2505.54	-137.00925	6.09	7.83	-.08048	.08
27	307.49	1350.76	172.60	1783.20	-66.73115	5.73	7.49	.02687	.03
28	274.29	1714.80	284.58	2262.81	-7.30260	5.61	7.72	.03261	.03
29	251.72	1358.41	241.86	1881.32	28.04915	5.53	7.54	.08125	.08
30	290.76	583.00	72.43	798.35	-179.13839	5.67	6.68	-.29725	.30
31	229.87	625.67	97.62	944.84	-34.42626	5.44	6.85	-.11543	.12
32	219.54	590.14	80.55	944.95	24.58253	5.39	6.85	-.07714	.08
33	2024.54	1784.07	591.89	4128.91	-164.89639	7.61	8.33	.00439	.00
34	492.78	1106.98	231.56	1639.67	-187.80835	6.20	7.40	-.05826	.06
35	266.58	647.91	103.42	1048.61	6.17829	5.59	6.96	-.05787	.06
36	313.83	1534.69	237.54	2042.02	-49.14471	5.75	7.62	.02378	.02
37	761.99	2282.44	443.29	3430.88	-15.55328	6.64	8.14	-.16031	.16
38	322.79	1289.96	209.08	1780.43	-49.28727	5.78	7.48	.02787	.03
39	326.77	1673.42	226.87	2113.77	-123.80792	5.79	7.66	-.01913	.02
40	514.79	1651.98	263.29	2668.51	240.49114	6.24	7.89	.10895	.11
41	518.51	2238.34	405.29	3126.23	-7.02079	6.25	8.05	-.12700	.13
42	739.13	2137.59	457.58	3329.81	43.18017	6.61	8.11	-.11355	.11
43	445.01	1570.43	349.80	2336.23	-2.96220	6.10	7.76	.00382	.00

Hasil Input SPSS

	X1	X2	X3	Y	RES_1	LN.Pendpt.Asli.Daerah	LN.Alokasi.Belanja.Daerah	RES_2	ABS_RES2
43	445.01	1570.43	349.80	2336.23	-2.96220	6.10	7.76	.00382	.00
44	424.19	1846.53	364.17	2428.63	-181.98076	6.05	7.80	-.10358	.10
45	408.64	1642.02	330.04	2309.41	-52.40771	6.01	7.74	-.01737	.02
46	426.65	1477.19	262.15	2138.94	-23.00741	6.06	7.67	.02237	.02
47	472.02	2059.29	300.72	2779.84	-48.53888	6.16	7.93	-.07125	.07
48	439.20	1581.66	279.69	2069.96	-223.70484	6.08	7.64	-.08233	.08
49	315.30	1923.41	331.32	2493.41	-64.03463	5.75	7.82	-.03765	.04
50	507.17	1415.04	241.43	1879.12	-283.84281	6.23	7.54	-.09921	.10
51	375.38	1797.47	296.91	2413.16	-50.07673	5.93	7.79	-.02100	.02
52	388.64	1989.61	346.94	2623.73	-85.04749	5.96	7.87	-.07532	.08
53	346.60	1504.03	227.91	2075.04	-10.19214	5.85	7.64	.04042	.04
54	365.39	1905.40	334.24	2524.56	-66.12494	5.90	7.83	-.04850	.05
55	377.88	1444.52	232.44	1999.90	-58.86470	5.93	7.60	.01472	.01
56	438.26	1654.20	197.78	2135.48	-171.34730	6.08	7.67	-.04522	.05
57	404.10	1299.33	207.90	1836.44	-82.26622	6.00	7.52	.00664	.01
58	575.75	1494.81	346.73	2198.88	-190.08982	6.36	7.70	-.06922	.07
59	537.27	1527.77	271.68	2160.88	-168.84169	6.29	7.68	-.04887	.05
60	528.75	1345.61	245.67	2089.46	-27.13085	6.27	7.64	.03308	.03
61	591.00	1911.80	359.76	2766.66	-72.00464	6.38	7.93	-.07656	.08
62	363.13	1385.93	221.95	1877.97	-98.83058	5.89	7.54	-.00249	.00
63	241.30	1755.31	306.96	2297.51	2.32219	5.49	7.74	.04114	.04
64	339.75	1379.63	248.41	1860.10	-106.52633	5.83	7.53	-.00888	.01

Hasil Input SPSS

	X1	X2	X3	Y	RES_1	LN.Pendpt.Asli.Daerah	LN.Alokasi.Belanja.Daerah	RES_2	ABS_RES2
64	339.75	1379.63	248.41	1860.10	-106.52633	5.83	7.53	-.00888	.01
65	319.39	594.11	80.87	935.05	-88.20692	5.77	6.84	-.16974	.17
66	252.04	607.84	106.50	962.09	-27.38303	5.53	6.87	-.11216	.11
67	280.68	581.40	84.11	956.50	-17.93865	5.64	6.86	-.11449	.11
68	2385.94	1764.43	672.51	4764.05	74.44117	7.78	8.47	.07927	.08
69	560.58	1135.05	243.64	1866.50	-65.38032	6.33	7.53	.02221	.02
70	308.12	617.80	105.07	1089.71	35.74548	5.73	6.99	-.03494	.03
71	284.51	1593.76	166.28	2039.21	-31.14105	5.65	7.62	.05022	.05
72	822.69	2314.53	289.19	3600.85	174.37714	6.71	8.19	-.06177	.06
73	300.97	1304.33	145.66	1801.91	25.44059	5.71	7.50	.08150	.08
74	325.97	1662.88	188.00	2396.22	198.58470	5.79	7.78	.13361	.13
75	444.69	1711.07	216.61	2471.83	86.91351	6.10	7.81	.05711	.06
76	419.40	2304.33	266.09	3091.29	90.37262	6.04	8.04	-.05294	.05
77	700.43	2286.28	306.42	3402.04	112.51478	6.55	8.13	-.07849	.08
78	477.20	1645.39	280.13	2487.34	90.85488	6.17	7.82	.04917	.05
79	424.75	1297.93	235.95	2687.13	728.95813	6.05	7.90	.36219	.36
80	427.52	1679.39	220.03	2429.31	91.14759	6.06	7.80	.06332	.06
81	511.74	1541.98	197.82	2203.43	-61.58700	6.24	7.70	.01349	.01
82	512.35	2123.30	211.55	2824.36	-43.93615	6.24	7.95	-.05878	.06
83	437.90	1634.23	193.23	2499.01	216.22245	6.08	7.82	.12538	.13
84	358.05	1982.24	247.41	2527.62	-70.69507	5.88	7.84	-.03713	.04
85	418.71	1477.04	183.01	2231.50	135.38448	6.04	7.71	.11183	.11

Hasil Input SPSS

	X1	X2	X3	Y	RES_1	LN.Pendpt.Asli.Daerah	LN.Alokasi Bellanja.Daerah	RES_2	ABS_RES2	V
85	418.71	1477.04	183.01	2231.50	135.38448	6.04	7.71	.11183	.11	
86	432.69	1888.75	236.59	2570.33	1.52164	6.07	7.85	-.00447	.00	
87	388.75	2041.71	274.59	2717.69	8.56451	5.96	7.91	-.02890	.03	
88	305.32	1526.61	242.69	2123.95	45.66307	5.72	7.66	.07052	.07	
89	321.26	1941.52	230.64	2504.26	-3.95349	5.77	7.83	.00769	.01	
90	306.20	1556.92	159.78	2122.76	73.29660	5.72	7.66	.09810	.10	
91	330.27	1704.40	151.32	2347.13	129.72625	5.80	7.76	.10771	.11	
92	353.09	1348.74	139.65	1991.79	122.96605	5.87	7.60	.12707	.13	
93	480.30	1610.96	242.19	2536.33	199.61164	6.17	7.84	.10644	.11	
94	364.48	1607.32	206.03	2306.33	114.12894	5.90	7.74	.09171	.09	
95	495.28	1317.91	201.62	2042.03	18.92540	6.21	7.62	.06288	.06	
96	531.15	1984.51	228.04	2722.06	-35.36047	6.28	7.91	-.03762	.04	
97	308.71	1448.79	137.99	1958.75	32.96863	5.73	7.58	.08599	.09	
98	332.81	1759.21	170.24	2243.21	-46.40697	5.81	7.72	.02102	.02	
99	264.94	1400.28	255.97	2011.11	91.78607	5.58	7.61	.10687	.11	
100	377.37	542.58	65.81	1039.50	22.52404	5.93	6.95	-.06343	.06	
101	263.48	618.57	106.97	1031.09	19.03676	5.57	6.94	-.05838	.06	
102	240.96	600.50	76.89	932.07	-17.33804	5.48	6.84	-.11425	.11	
103	2545.99	1843.88	579.56	4871.95	11.21454	7.84	8.49	.09562	.10	
104	647.44	1187.47	193.53	2088.32	53.84067	6.47	7.64	.10289	.10	
105	340.05	629.24	73.34	1127.74	53.76891	5.83	7.03	-.01052	.01	

Lampiran Hasil Output SPSS

Lampiran: Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	105	219.54	2545.99	454.5645	344.53444
Dana Perimbangan Lain-Lain PAD	105	542.58	2314.53	1546.6617	440.19100
Belanja daerah	105	65.81	672.51	254.2678	111.90181
Valid N (listwise)	105	798.35	4871.95	2254.5790	710.86287

Lampiran : Uji Normalitas Sebelum Di Transformasi Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	137.9887239
		0
Most Extreme Differences	Absolute	.143
	Positive	.143
	Negative	-.123
Test Statistic		.143
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain PAD	Belanja daerah
N		105	105	105	105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	454.5645	1546.6617	254.2678	2254.5790
	Std. Deviation	344.53444	440.19100	111.90181	710.86287
	Most Extreme Differences				
	Absolute	.281	.117	.103	.119
	Positive	.281	.094	.103	.106
	Negative	-.248	-.117	-.072	-.119
Test Statistic		.281	.117	.103	.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.001 ^c	.008 ^c	.001 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 3.3 : Uji Normalitas Setelah Di Transformasi Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09059620
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.048
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.183 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 3.4 : Uji Hereroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.033	.114		-.290	.773
LN.Pendpt.Asli.Daerah	.024	.021	.161	1.164	.247
Dana Perimbangan	-2.473E-5	.000	-.177	-1.405	.163
Lain-Lain PAD	-3.094E-5	.000	-.056	-.347	.729

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Lampiran 3.5 : Uji R Square dan Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.965 ^a	.931	.929	.09193	1.749

a. Predictors: (Constant), Lain-Lain PAD, Dana Perimbangan, LN.Pendpt.Asli.Daerah

b. Dependent Variable: LN.Alokasi.Bellanja.Daerah

Lampiran 3.6 : Uji F Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	11.453	3	3.818	451.733	.000 ^b
Residual	.854	101	.008		
Total	12.307	104			

a. Dependent Variable: LN.Alokasi.Bellanja.Daerah

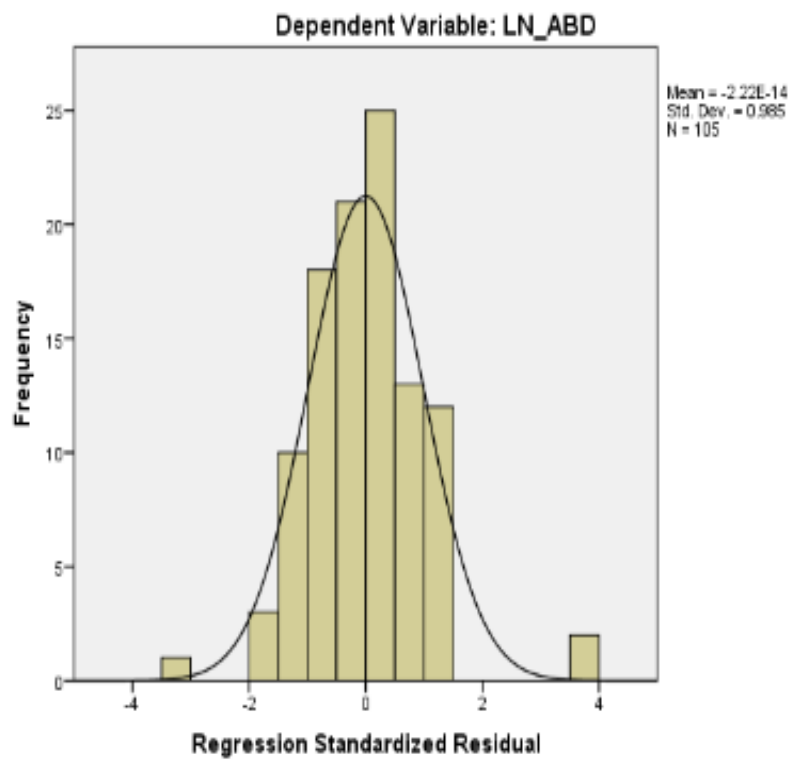
b. Predictors: (Constant), Lain-Lain PAD, Dana Perimbangan, LN.Pendpt.Asli.Daerah

Lampiran 3.7 : Uji Regresi Linear Berganda dan Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.420	.171		31.712	.000
	LN.Pendpt.Asli.Daerah	.213	.031	.254	6.833	.000
	Dana Perimbangan	.001	.000	.689	20.414	.000
	Lain-Lain PAD	.001	.000	.177	4.069	.000

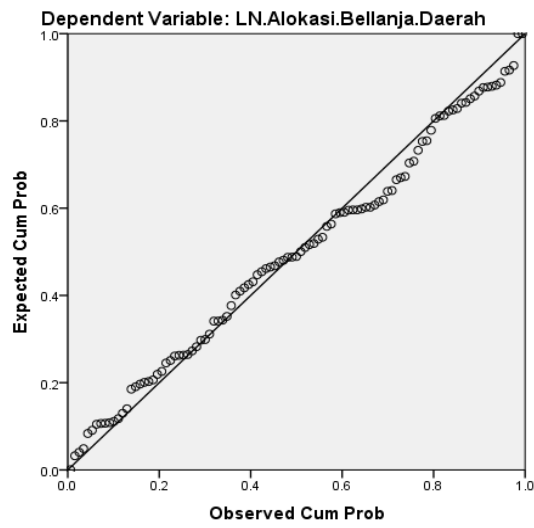
a. Dependent Variable: LN.Alokasi.Bellanja.Daerah

Lampiran 3.8 : Grafik P Plot Dan Histogram



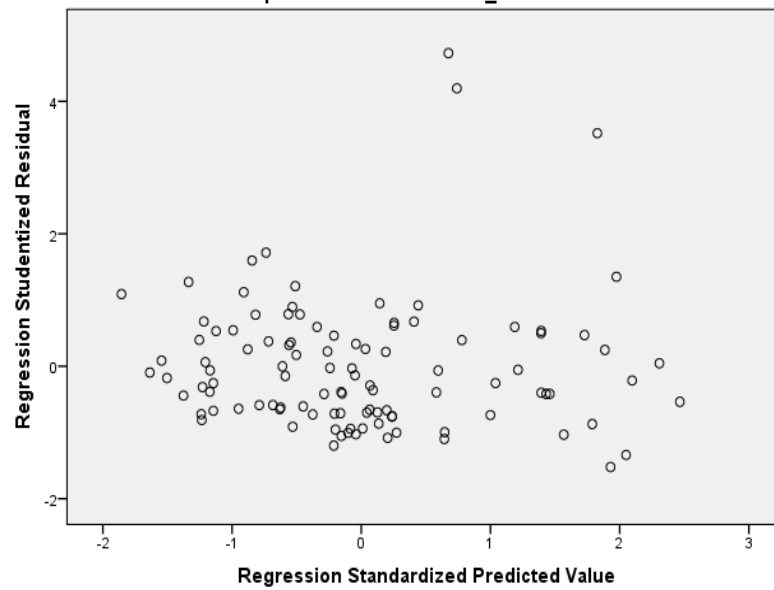
Scaterplot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: ABS_RES2



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jati Rahmawati
NIM : 2321011
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 14 September 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jomblang Barat IV No. 663 RT 08/03
Semarang
No. Hp : 08562666840
E-mail : jatirahmawati89.jr@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. Tahun 1996 – 2001 SD Negeri Genuk Sari 01 Semarang
2. Tahun 2001 – 2004 SMP Kesatrian 1 Semarang
3. Tahun 2004 – 2007 SMA NEGERI 11 Semarang
4. Tahun 2007 - 2010 Universitas Diponegoro

Karya Ilmiah :

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja daerah (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 -2022)”